

ABSTRAK

Infrastruktur jalan merupakan salah satu tonggak utama konektivitas, karena perannya yang sangat penting dalam aktivitas perpindahan barang dan jasa. Pada pelaksanaan pelayanan publik terkait penyelenggaraan jalan provinsi di wilayah Madura khususnya di daerah Pamekasan pada saat ini masih ditemui beberapa masalah. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 24 ayat (1), disebutkan bahwa penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Berkaitan dengan kewajiban penyelenggara jalan tersebut, maka timbul beberapa pertanyaan mengenai bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya dalam hal pelayanan terkait pengelolaan fasilitas jalan raya di wilayah Kabupaten Pamekasan, serta bagaimana kinerja dinas dalam melaksanakan kewenangannya terkait pengelolaan fasilitas jalan raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur khususnya pada UPT Pengelolaan jalan dan Jembatan Pamekasan pada saat mengimplementasikan sebagian tugas dan fungsinya serta kewenangannya dalam hal pelayanan terkait pengelolaan fasilitas jalan raya di wilayah Kabupaten Pamekasan dengan baik, namun mengalami kendala terkait dana darurat untuk perbaikan jalan yang rusak. Selain itu masih terdapat beberapa aspek yang belum dipenuhi oleh dinas, terkait dengan kewenangan pengawasan jalan secara berkala dan pemberian tanda atau rambu pada jalan yang rusak sesuai dengan yang diatur dalam UU LAJ.

Kata kunci: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Kinerja, Penyelenggaraan jalan provinsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.4. Manfaat Penulisan	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktis	7
1.5. Keaslian Penelitian	7
1.6. Metode Peneletian	9
1.6.1. Jenis Penelitian	9
1.6.2. Pendekatan Penelitian	9
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	9
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	12
1.7. Metode Penelitian	13
 BAB II PENGERTIAN DAN TEORI	 15
2.1. Beberapa Pengertian	15
2.1.1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jatim.....	15
2.1.2. Tugas Pelayan Publik	17
2.1.3. Penyelenggaraan Jalan	21
2.2. Beberapa Teori	24
2.2.1. Teori <i>Good Governance</i>	24
2.2.2. Teori Kewenangan	29
2.2.3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	32
 BAB III TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR DI KABUPATEN PAMEKASAN	 35

3.1. Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Dalam Hal Pelayanan Terkait Pengelolaan Fasilitas Jalan Raya Di Wilayah Kabupaten Pamekasan	35
3.1. Kewajiban Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Terkait Dengan Pemberian Tanda Kerusakan Jalan	45
 BAB IV PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA	62
BIODATA PENULIS	65

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi UPT. Pengelolaan Jalan dan Jembatan.....	47
Bagan 2 Tabel Identifikasi permasalahan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur.....	48
Bagan 3 Wilayah kerja UPT pengelolaan jalan dan jembatan Pamekasan.....	51
Bagan 4 Kondisi Jalan Raya Pakong-Waru yang berlubang.....	59
Bagan 5 Kondisi Jalan Raya Pakong-Waru yang retak.....	60
Bagan 6 Kondisi Jalan Raya Pakong-Waru yang mengalami distorsi.....	60